



Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat membuka acara Pertemuan Tahunan Bakohumas Tingkat Nasional.

# PERTEMUAN TAHUNAN BAKOHUMAS TINGKAT NASIONAL

Oleh: **Kombes Pol. Drs. Runadi Ma'mun**

**P**ertemuan Bakohumas Tingkat Nasional dilaksanakan pada tanggal 30-31 agustus 2007 bertempat di Hotel Sahid Raya di Denpasar Bali, dengan mengusung tema "**Peningkatan Fungsi Humas untuk Membangun Citra Positif Pemerintah**".

Sekitar 600 orang peserta pengemban fungsi Humas Departemen, Instansi Pemerintah, Propinsi, Kabupaten/Kota, BUMN, Perguruan Tinggi Negeri dan Kabid Humas Polda.

Dipahami bersama, di era reformasi, demokratisasi dan transparansi, serta derasnya arus globalisasi menerpa, berdampak pada perubahan-perubahan yang besar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Seiring dengan perubahan-

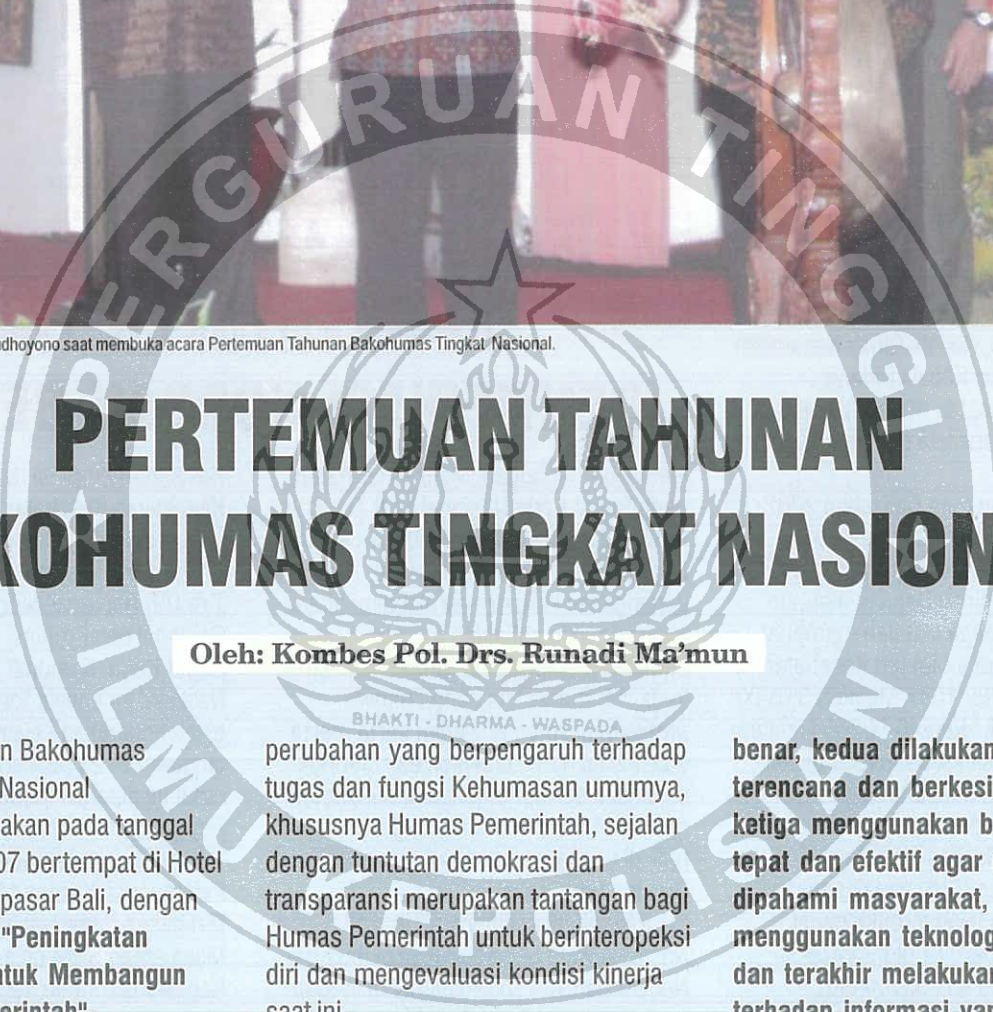
perubahan yang berpengaruh terhadap tugas dan fungsi Kehumasan umumnya, khususnya Humas Pemerintah, sejalan dengan tuntutan demokrasi dan transparansi merupakan tantangan bagi Humas Pemerintah untuk berinteropeksi diri dan mengevaluasi kondisi kinerja saat ini.

Dengan latar belakang itulah maka Departemen Komunikasi dan Informatika bekerjasama Badan Koordinasi Kehumasan Pemerintah menyelenggarakan kegiatan Pertemuan Tahunan Tingkat Nasional Bakohumas Pemerintah.

Kepada anggota Bakohumas se Indonesia dan peserta pertemuan, Kepala Negara RI memberikan lima arahan agar bisa menjalankan fungsi Kehumasan dengan baik, **pertama harus menyampaikan berita dengan**

**benar, kedua dilakukan secara terencana dan berkesinambungan, ketiga menggunakan bahasa yang tepat dan efektif agar mudah dipahami masyarakat, keempat menggunakan teknologi informasi dan terakhir melakukan evaluasi terhadap informasi yang telah disampaikan kepada masyarakat.**

Dalam acara penyerahan pemenang, lomba Anugerah Media Humas tahun 2007 telah diserahkan kepada para juara umum tingkat Departemen/Instansi Departemen Arsip Nasional, juara umum tingkat BUMN PT. Telkom dan juara umum tingkat Perguruan Tinggi Universitas Indonesia, sedangkan Mabes Polri mendapatkan Juara Harapan II Kategori Profil Lembaga Audio Visual Departemen dan Lembaga Negara.\*\*\*



Setiap Propinsi di Indonesia diharapkan memiliki tim identifikasi korban bencana (Disaster Victim Identification/DVI) untuk mengenali korban bencana massal secara ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan. Keberadaan tim DVI Propinsi sangat penting untuk mengatasi kendala waktu dan transportasi saat terjadi bencana alam (natural disaster) maupun bencana yang disebabkan manusia (man made disaster). Identifikasi korban bencana diperlukan untuk menegakkan HAM, membantu proses penyidikan dan memenuhi aspek legal sipil. Untuk itu, saat ini lembaga yang sudah dibentuk, perlu segera direplikasi di setiap Propinsi yang ada di Indonesia. Menkes Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP (K) telah membuka Rapat Kerja Nasional ke II Tim DVI Nasional Indonesia, di Gedung Depkes Jakarta, 19 September 2007, acara ini dihadiri oleh Kapolri Jenderal Sutanto, Kepala Dinas Kesehatan seluruh Indonesia, Kepala Bidang Kedokteran Kesehatan (Kabiddokkes) Polda seluruh Indonesia dan lintas sektor terkait.

Sejak kejadian bom Bali tahun 2002, penanganan korban mati massal pada bencana mulai mendapat perhatian yang serius, baik dari pihak Depkes maupun Polri, kedua lembaga ini telah membuat Keputusan Bersama Menteri Kesehatan RI dengan Kapolri, No. 1087/Menkes/SKB/IX/2004 dan No. Pol. : Kep/40/IX/2004 tentang Pedoman Penatalaksanaan Identifikasi Korban Mati pada Bencana Massal yang ditandatangani pada tanggal 29 September 2004. Menurut Menkes, kegiatan identifikasi korban (DVI) pada bencana massal yang lalu telah terbukti dapat berjalan dengan baik. Contohnya pada kasus terbakarnya bus Situbondo, Tsunami Aceh dan Nias, Bom Bali II, jatuhnya pesawat Mandala Airlines di Medan, pengeboman Kedubes Australia di Jakarta, gempa DIY hingga Tsunami Pangandaran dan lainnya.

Pada Rapat Kerja Nasional ke I Tim Identifikasi Nasional dan Regional di Semarang, Desember 2004 telah menyepakati beberapa hal, diantaranya membentuk Tim Kerja untuk menyusun pedoman/standar pelaksanaan identifikasi, melakukan pelatihan teknik identifikasi korban bencana di dalam dan di luar negeri, mengupayakan laboratorium identifikasi rujukan, serta mengupayakan sarana dan prasarana



Menteri Kesehatan RI Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP (K) didampingi Kapolri Jenderal Sutanto membuka Rakernas Tim Disaster Victim Identification (DVI).

## PEMBENTUKAN TIM IDENTIFIKASI KORBAN BENCANA

identifikasi lapangan. Menkes berharap, pada Rapat Kerja Nasional ke II Tim DVI Nasional Indonesia ini, hubungan antara Dapkes dengan Polri dalam hal penanganan korban mati akibat bencana akan semakin solid dan harmonis serta semakin meningkatkan profesionalisme kerja. "Tentunya kita sadari bahwa profesionalisme kerja tidak serta merta ada, hal itu harus dibentuk dan dipupuk sejak dini serta memerlukan dukungan moral dan materiil dari berbagai pihak, baik di tingkat pusat maupun tingkat Propinsi/Kab/Kota"

Saat ini telah dibentuk Tim DVI Nasional yang berkedudukan di Ibu Kota Negara dan Tim DVI Regional di Medan (untuk regional Barat I), Jakarta (untuk Regional Barat II), Surabaya (untuk Regional III) dan Makassar (Untuk Regional Timur). Masa tugas Tim tersebut akan berakhir pada Bulan September 2007, sehingga pada pertemuan ini akan dilantik Tim DVI Nasional dan Regional untuk periode tahun 2007 - 2010. Selain membentuk Tim DVI periode II, pertemuan ini juga bertujuan agar hubungan kerjasama antara Depkes dan Polri tetap terjalin dengan baik sehingga penanganan korban mati massal akibat bencanapun dapat semakin baik dan profesional.

Pertemuan ini diharapkan dapat menjadi ajang konsolidasi antara Dinas

Kesehatan Propinsi dengan Bidang Kedokteran Kesehatan (Biddokkes) Polda, guna memantapkan kerja Tim DVI serta menjadi ajang pertukaran informasi antara Tim DVI Nasional dengan Tim DVI Regional dan Propinsi yang telah dibentuk. Rapat Kerja Nasional ke II Tim DVI Nasional Indonesia Tahun 2007 diselenggarakan selama 3 hari dari tanggal 18 - 20 September 2007, pada rapat ini dibahas mengenai Kebijakan Depkes dalam Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) dan Penanganan Korban Mati Massal, Peran DVI dalam Penanganan Bencana, Manajemen SDM dalam Kegawatdaruratan Sehari-hari dan Penanganan Bencana di Indonesia, Penanganan Korban Mati akibat Bencana berdasarkan UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Kebijakan dan Strategi Penanggulangan Krisis, dan Pengalaman Operasi Tim DVI Indonesia. Rapat Kerja yang diikuti 150 peserta ini juga mencermati Undang-Undang No. 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Dalam UU tersebut belum tercantum perihal penanganan terhadap korban mati massal akibat bencana. Padahal dalam penanggulangan korban bencana hendaknya meliputi tiga hal yaitu korban hidup yang mengalami luka, korban mati dan pengungsi.\*\*\*